



**DIPLOMASI KEBUDAYAAN ANTARA KERATON YOGYAKARTA DAN  
PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA PADA MASA PEMERINTAHAN  
SULTAN HAMENGKUBUWONO VIII 1921-1939**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun Oleh :**

**AYU AMALYA MA'AS  
NIM. 13030112140103**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya, Ayu Amalya Ma'as, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 6 Maret 2020

Penulis

Ayu Amalya Ma'as  
NIM. 13030112140103

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“ I stopped telling myself that I’m lost. I’m not. I’m on a road with no destination. I’m just driving with hope that i’ll find a place that i like and I’ll stay there. I’m not Lost. I’m on my way.”*

*“Cuiusvis hominis est errare”* (Setiap orang bisa berbuat salah, sebuah kutipan dari karya Cicero, Philippica XII, 5)

Dipersembahkan untuk :

Mama, Papa, Dinda yang selalu membuat rumah menjadi tempat yang dirindukan untuk kembali pulang.

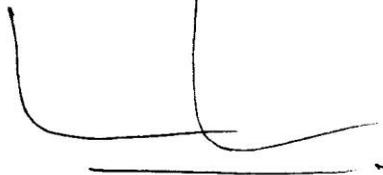
Disetujui,  
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Yuliati', written in a cursive style.

Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP 19540725 198603 2 001

Skripsi dengan judul “Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII 1921-1939” yang disusun oleh Ayu Amalya Ma’as (NIM 13030112140103) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Senin, 22 Juni 2020

Ketua,



Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum.  
NIP 19680829 199403 1 001

Anggota I,



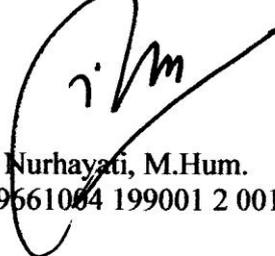
Dr. Endang Susilowati, M.A.  
NIP 19590516 198811 2 001

Anggota II,



Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.  
NIP 19540725 198603 2 001

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Nurhayati, M.Hum.  
NIP 19561004 199001 2 001

## KATA PENGANTAR

Ucapan Syukur Alhamdulillah penulis hantarkan penuh kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, kekuatan dan petunjuk-Nya yang tanpa jeda sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII 1921-1939”. Pemilihan tema ini selain didasarkan pada pentingnya kajian tentang kebudayaan akulturasi kebudayaan (dalam konteksnya kebudayaan asli dengan kebudayaan bangsa pendatang), juga didasari karena adanya ketertarikan yang besar dari diri penulis untuk menelusuri pada aspek apa-apa saja percampuran berikut toleransi kebudayaan bisa terjadi dalam lingkup keraton Yogyakarta yang merupakan pusat kebudayaan Jawa yang agung.

Penulis sendiri memiliki latar belakang pendidikan sejarah, namun disisi lain merupakan seseorang yang amat menyukai kebudayaan dan dinamikanya. Bekal ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di Jurusan Sejarah, amat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Kesulitan-kesulitan yang ditemui di lapangan adalah sesuatu yang wajar, namun agaknya dorongan semangat dari berbagai pihak begitu berpengaruh terhadap terus berjalannya proses penyusunan skripsi, tak peduli akan kesulitan yang ditemui dalam prosesnya. Namun demikian tidak melupakan bahwa yang menjadi tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menempuh ujian akhir program Strata-1 pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual, kepada yang terhormat :

1. Dr. Nurhayati, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

2. Drs. Dhanang Respati Puguh., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh dedikasi dan kesabarannya dalam memberikan bekal dan pandangan keilmuan terkait dengan tema skripsi yang penulis pilih, arahan dan bimbingannya amat berguna dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Terima kasih yang tak kalah besarnya juga penulis ucapkan kepada Dra. Sri Indrahti, M.Hum, selaku dosen wali, yang dengan sabar dan terbuka memberikan perhatian atas perkembangan akademik penulis.
5. Ucapan terima kasih juga tidak lupa dihaturkan kepada segenap dosen penguji :Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.,Dr. Endang Susilowati, M.A., yang telah memberikan saran maupun kritik yang bersifat membangun bagi skripsi ini.
6. Terima kasih juga tidak lupa penulis haturkan kepada segenap pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan sejak awal penulis memasuki dunia perkuliahan hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir penulis. Tak lupa juga rasa terima kasih penulis haturkan kepada segenap staff administrasi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan terkait urusan administrasi mahasiswa.
7. Lebih lanjut, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua terhebat di dunia, Henry Ma'as dan Ugie Sastina, atas dukungan, dorongan, dan kepercayaan yang tiada pernah berbatas. Tanpa mereka mustahil penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kesadaran. Tak lupa juga, Adinda Avisha Ma'as, sebagai teman berkelakar sekaligus berkelahi hingga kami berdua bertumbuh besar, terima kasih untuk banyak waktu kita untuk tumbuh bersama. Kepada Andri

Prayoga, sosok kakak yang bisa menjadi tempat belajar dan bercanda, masa kecil kami sulit digambarkan dalam kata-kata.

8. Tak lupa, ucapan terima kasih kepada semua kawan-kawan seangkatan Sejarah 2012, khususnya Shabrina, Andrea, Isty, Rafngi, Purent, Tyas, Berta, Murni, Nida, Opin, April, Niken, Cipaw, Irvan, Wanda, Ridwan, Rhino, Kudus, Ichsan, Oki, Umar. Banyak momen bahagia, momen seru yang pasti tidak akan seseru itu jika bukan kalian yang menjadi kawan perjalanannya. Terima kasih untuk waktu dan segala momen kebersamaan yang sangat indah, definisi masa mudaku ya kalian semua. Terima kasih telah begitu *perfectly fit*, seperti sepatu dengan ukuran yang pas, yang bisa nyaman untuk aku bawa berlarian kesana-kemari. Terima kasih untuk kalian tanpa terkecuali. Kalian adalah saudara yang berbeda orang tua, terima kasih sudah saling peduli dan saling memiliki selama ini. *Lets meet after the storm!*
9. Kepada Dila, Poe, Daniel, Sari, Galih, Lina, yang akan selalu mengobati rindu kala liburan semester. Kalian yang mengajari bahwa bertumbuh besar dan beranjak dewasa bukan penghalang untuk terus melakukan rutinitas masa SMA kita (meski kemudian kita sadari bahwa prosentasenya menurun drastis dari sebelumnya), *Thanks for remain the same, the words "I love you" was never enough to explain what i'm feeling towards you all. Grow up well, guys! See you on top! Don't forget to planning our next meet up~!*
10. Kepada adik-adik di dunia yang berbeda denganku, yang bisa dilihat tapi tidak pernah bisa disentuh. Terima kasih sudah datang dan membantu bangkit dan tersenyum lagi. Untuk kalian adik-adik yang akan terus bertambah jumlahnya, Terima kasih untuk selalu bekerja keras dan membuat aku menyadari bahwa bahagia selalu sederhana. Terima kasih banyak, *my dearest Neo Culture Technology!*
11. Pada hakikatnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dari segi redaksional maupun substansialnya. Sehingga kritik dan saran dalam rangka untuk perbaikan karya ini sangat penulis harapkan. Meskipun mungkin tidak akan berarti banyak, semoga skripsi ini

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mampu membuka cakrawala anak bangsa tentang sejarah bangsanya sendiri.

Semarang, 15 April 2020  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xiii
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xviii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xxiii
<b>ABSTRAK</b>	xxiv
<b>ABSTRACT</b>	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Metode Penelitian dan penggunaan sumber	24
G. Sistematika Penulisan	28
<b>BAB II LATAR BELAKANG HUBUNGAN DIPLOMASI KEBUDAYAAN KERATON YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA</b>	30
A. Sejarah Kelahiran dan perkembangan Keraton Yogyakarta	31
1. Hubungan antara Keraton Yogyakarta dan VOC	31
a. Interaksi dengan Belanda sebelum Giyanti 1755	33
b. Interaksi dengan Belanda pasca Giyanti 1755	35
2. Hubungan antara Keraton dan Pemerintah Kolonial Belanda	39
a. Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II-IV	40
b. Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V-VII	48
c. Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII	59
B. Profil Sultan Hamengku Buwono VIII (1880-1939)	61
1. Sultan Hamengku Buwono VIII dan kesenian	65
2. Perubahan-perubahan masa Sultan Hamengku Buwono VIII	67
3. Peninggalan masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII	69

<b>BAB III</b>	<b>DIPLOMASI KEBUDAYAAN ANTARA KERATON YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA PADA MASA SULTAN HAMENGKU BUWONO VIII (1921-1939)</b>	72
A.	Agenda saling mengunjungi antara Keraton Yogyakarta dan Belanda	73
1.	Sumber naskah keraton Yogyakarta tentang agenda saling mengunjungi antara Keraton Yogyakarta dan Belanda	75
2.	Acara- acara penting Keraton Yogyakarta yang melibatkan pihak Belanda	81
a.	<i>Garebeg</i>	81
b.	<i>Jumenengan Dalem</i>	85
c.	<i>Tingalan/ Wiyosan Dalem</i>	87
B.	Saluran – saluran Diplomasi Kebudayaan Keraton Yogyakarta	88
1.	Seni Tari	90
a.	Bedhaya	91
b.	Srimpi	92
2.	Seni Drama Tari/ <i>Wayang wong</i>	94
3.	Seni Musik	101
4.	Seni Bangunan atau arsitektur	104
a.	Bangsas Manis	105
b.	Gedhong Gangsa	107
c.	Gedhong Sarangbaya	108
d.	Gedhong Patehan	109
e.	Bangsas Kothak	110
f.	Bangsas Mandalasana	111
5.	Kuliner	113
C.	Upaya-upaya yang dilakukan oleh HB VIII untuk memenuhi diplomasi kebudayaan	117
1.	Pembaharuan terhadap kesenian pertunjukan	117
2.	Penambahan instrumen musik modern untuk mengiringi upacara protokoler keraton	119
3.	Pengadaan fasilitas untuk menunjang jalannya upacara protokoler kerajaan	123
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM PROSES DIPLOMASI KEBUDAYAAN DI KERATON YOGYAKARTA MASA PEMERINTAHAN HB VIII DAN SOLUSINYA</b>	126
A.	Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan di keraton Yogyakarta	127

1. Dualisme raja : berdamai demi suksesi	127
2. Sultan dan alokasi anggaran agenda seremonial	132
3. Idealisme keraton sebagai pusat budaya Jawa	136
B. Solusi untuk mengatasi hambatan – hambatan pelaksanaan diplomasi kebudayaan	139
C. Hasil dari proses diplomasi kebudayaan	144
1. Tidak adanya friksi selama masa pemerintahan HB VIII	145
2. Suksesi tahta HB IX berjalan lancar	146
<b>BAB V SIMPULAN</b>	<b>152</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>154</b>
<b>DAFTAR INFORMAN</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>174</b>

## DAFTAR SINGKATAN

B.P.H.	:	Bandara Pangeran Harya
B.R.Ay.	:	Bandara Raden Ayu
B.R.M.	:	Bandara Raden Mas
G.B.P.H.	:	Gusti Bandara Pangeran Harya
G.K.R.	:	Gusti Kangjeng Ratu
G.P.H.	:	Gusti Pangeran Harya
G.R.M.	:	Gusti Raden Mas
HB	:	Hamengku Buwono
K.G.P.A.	:	Kangjeng Gusti Pangeran Arya
K.G.P.A.A.	:	Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya
K.H.P.	:	Kawedanan Hageng Punakawan
K.P.A.	:	Kangjeng Pangeran Adipati
K.P.H.	:	Kangjeng Pangeran Harya
K.R.A.A	:	Kangjeng Raden Ayu Adipati
K.R.T.	:	Kangjeng Raden Tumenggung
Ms.	:	Manuskrip
R.Ay.	:	Raden Ayu
R.L.	:	Raden Lurah
R.M.	:	Raden Mas
R.Ng.	:	Raden Ngabehi
R.T.	:	Raden Tumenggung
R.W.	:	Raden Wedana
PB	:	Paku Buwono
SB	:	Sana Budaya
VOC	:	Vereenigde Oostindische Compagnie



## DAFTAR ISTILAH\*

aliansi	:	ikatan antara dua Negara atau lebih dengan tujuan politik
apanage (tanah)	:	dalam istilah lain dikenal dengan tanah lungguh yaitu tanah jabatan sementara sebagai upah atau gaji seorang priyayi atau bangsawan. Dapat dieksploitasi sehingga dapat menghasilkan pajak yang berupa uang, barang atau tenaga kerja.
birokrasi	:	sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
bludiran	:	Istilah lain dari bordiran atau sulaman
borjuasi	:	golongan masyarakat yang penghasilannya melebihi penghasilan rata-rata rakyat biasa; golongan menengah ke atas.
cacah	:	petani yang tetap menjadi warga desa.
dualisme	:	keadaan bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.
elite	:	orang – orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok; kelompok kecil orang – orang terpandang atau berderajat tinggi (kaum bangsawan, cendekiawan, dsb)
feodalisme	:	sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja; sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.
idealisme	:	hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna.
intensif	:	secara sungguh – sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang

---

\*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

	optimal.
intervensi	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, Negara, dan sebagainya).
intrik	: penyebaran kabar bohong yang sengaja untuk menjatuhkan lawan; perilaku tokoh-tokoh yang bersekongkol untuk menjatuhkan tokoh lain.
jamang kawula	: Nama lain siger, merupakan sejenis perhiasan kepala yang dikenakan di dahi : rakyat dari suatu negara; orang yang di bawah perintah suatu negara; pengikut.
klasifikasi	: penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
Kolonial	: berhubungan dengan sifat jajahan
kompromi	: persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan (tentang persengketaan dan sebagainya).
konsensus	: kesepakatan kata atau pemufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
legitimasi	: keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan.
loji, tedhak loji	: Sebutan untuk rumah dinas residen Yogyakarta, giliran sultan untuk berkunjung ke loji/ rumah residen.
moderat	: berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah : pandangannya cukup--, mau mempertimbangkan pandangan pihak lain.
nasionalisme	: kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.
<i>nebuleuses</i>	: istilah untuk menggambarkan tiap substrata kebudayaan merupakan suatu konstelasi mental, suatu system yang berdiri sendiri dengan unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain tapi konturnya sukar ditentukan.
<i>nebuleuses mentales</i>	: mengacu pada berbagai substrata kebudayaan Jawa yang terbentuk karena persinggungan masyarakat Jawa

	dengan kebudayaan lain.
negosiasi	proses tawar – menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.
<i>ngabekten</i>	tradisi yang dilakukan pada saat dilaksanakan upacara lingkaran hidup, dimaksudkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sri Sultan sebagai junjungan mereka, yang telah memberi rezeki dan pengayoman selama mereka mengabdikan di keraton. Pada zaman dahulu, <i>Ngabekten</i> pernah diadakan selama satu minggu berturut-turut.
<i>open minded tolerance</i>	: sikap toleran terhadap nilai atau paham yang berbeda, penerimaan yang lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman.
<i>Pisowanan</i>	sebuah tradisi dalam kerajaan – kerajaan Jawa, di mana bawahan – bawahan raja / sultan datang ke istana untuk melaporkan perkembangan daerah yang dipimpinnya. Bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin daerah kepada raja.
<i>Pisowanan Ageng</i>	: pertemuan agung antara rakyat dengan raja yang memimpin.
Politik asosiasi	: politik yang dicanangkan dengan harapan dapat menciptakan kesetaraan antara penjajah dengan generasi mudah bangsa yang terjajah melalui pendekatan kebudayaan.
pranata	: sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat.
prestise	: wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang.
propaganda	: penerangan (paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.
	surat – surat yang memuat hasil perundingan

protokol	:	(persetujuan dan sebagainya).
<i>savoir vivre</i>	:	istilah Perancis yang diartikan menjalani kehidupan yang baik sembari tetap mempertahankan gaya hidup elegan dan cerdas.
<i>stained glass</i>	:	kaca patri; merujuk pada kaca yang telah dicampur bahan kimia atau diperlakukan sedemikian rupa melalui proses kimia hingga berubah menjadi warna tertentu yang kita inginkan.
stratifikasi	:	pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak – hak istimewa, dan prestise.
suksesi	:	penggantian (terutama di lingkungan pimpinan tertinggi Negara), karena pewarisan ; proses penggantian kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
visioner	:	orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan.
<i>Vorstenlanden</i>	:	wilayah – wilayah kerajaan; istilah yang biasanya dipakai untuk menyebut wilayah yang sekarang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekas – bekas wilayah Surakarta.
<i>westernization</i>	:	sebuah proses di mana masyarakat berada dalam berbagai bidang seperti Industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, gaya makan, pakaian, bahasa, alphabet, agama, filsafat dan nilai-nilai.
yurisdiksi	:	kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
2.1	Gubernur Bijleveld duduk sejajar di sebelah kiri Sultan Hamengku Buwono VIII, ketika kunjungannya ke keraton Yogyakarta	42
2.2	Foto grup dengan Residen L.F. Dingemans dan HB VIII, memenuhi undangan jamuan di Loji Freemason Mataram untuk merayakan hari jadi dari Van Gorkom & Co. firm	61
2.3	Nama kecil pangeran-pangeran dalam potret kelompok ini, berurutan dari kanan ke kiri : G.R.M. Soedjadi (kemudian berganti menjadi Poerbojo dan Sultan HB VIII), G.R.M. Poentoadji, G.R.M. Poetra, G.R.M. Mas Soegiri, B.R.M. Soegirman. Nama mereka setelah dewasa adalah Ngarsa Dalem Sampejan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan HB VIII, G.P.H. Mangkukusumo, Sampeyan Dalem K.G.P.A.A. Hamengkunegara, K.G.P.H Djoeminah, B.P.H. Soerjodiningrat.	62
2.4	Sultan Hamengku Buwono VIII ketika masih bergelar Pangeran Purboyo, duduk di bawah sebelah kiri Sultan, putrinya, dan duduk di kursi sebelahnya Ratu Pembayun. Gambar diambil di kediaman Pangeran Purboyo, di Sompilan 12, Ngasem, Yogyakarta.	63
2.5	Foto grup dengan Residen L.F. Dingemans dan HB VIII, dalam kunjungan Sekolah Kristen Belanda-Jawa.	69
3.1	Para penari serimpi di Istana Gubernuran Yogyakarta (Gedung Agung)	78
3.2	Sultan Hamengku Buwono VIII mengenakan busana <i>Generaal Majoor Groot Tenue</i>	79
3.3	Sultan Hamengku Buwono VIII (tampak mengenakan busana <i>Generaal Majoor Groot Tenue</i> ) dan Gubernur Jawa tengah, R.K.A. Bertsch, di Yogyakarta, di belakang Sultan ada patih Danuredja VIII	80

3.4	Sultan HB VIII bertemu dengan asisten residen Christiaan Abbenhuis (kanan) di depan Kereta Kyai Garuda Yeksa di yogyakarta	80
3.5	<i>Abdi dalem</i> membawa <i>gunungan kakung/gunungan lanang</i>	82
3.6	<i>Abdi dalem</i> membawa <i>gunungan putri/gunungan estri</i>	82
3.7	Gambar Gunungan Lanang yang terdiri atas berbagai macam hasil bumi, dijunjung oleh 24 laki-laki, sebagai persembahan dari Sultan atas nama Keraton untuk seluruh Rakyat kerajaan	84
3.8	Para penari <i>bedhaya</i> ketika melakukan penyambutan terhadap tamu di keraton yogyakarta pada masa HB VIII	92
3.9	Para penari sedang menampilkan tarian di depan tamu-tamu eropa di keraton Yogyakarta (Formasi tari Srimpi Renggawati)	94
3.10	Penampilan <i>Wayang Wong</i> dengan lakon “Jaya Semadi dan Sri Suwela” di Keraton Yogyakarta, terhitung sejak tanggal 3-6 September 1923	95
3.11	Aksi <i>Toast</i> Sultan Hamengku Buwono VIII dengan segenap tamu undangan untuk menyelamati pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard	96
3.12	Salah satu dokumentasi pementasan <i>wayang wong/ wayang topeng</i> di keraton Yogyakarta	99
3.13	Korps pemusik di Bangsal Mandalasana Keraton Yogyakarta	103
3.14	Salah satu dokumentasi makan malam ( <i>Diner</i> ) dengan tamu-tamu Belanda bertempat di Bangsal Manis	105
3.15	Bangsal Manis	106
3.16	Beberapa contoh hiasan kaca patri di bagian atas bangsal Manis. Ornamen hias yang terbuat dari kaca ini menggambarkan perlengkapan perjamuan seperti botol dan gelas minuman juga teko dan cangkir.	107
3.17	Gedong Gangsa tampak depan, sisi utara dan selatan	108

	dipisahkan oleh <i>Regol Gapuro</i> menuju ke <i>bangsal Kesatriyan</i>	
3.18	<i>Abdi dalem keparak</i> yang bersamir sedang bertugas mengantarkan unjukan untuk Sultan.	110
3.19	Bangsals kotak Keraton Yogyakarta	111
3.20	Hiasan <i>stained glass</i> bergambarkan alat musik modern barat (Tambur, terompet, Gitar, Klentingan, Biola, harpa, dsb) di bagian atas Bangsal Mandalasana	112
3.21	Bangsals Mandalasana Keraton Yogyakarta	113
3.22	contoh sajian keraton Yogyakarta yang memperoleh pengaruh Barat. Selat Huzar (Atas) dan Bistik Lidah (Bawah).	115
3.23	Penari serimpi sebagai perwakilan dari Sultan HB IX, tampil di kediaman residen di Yogyakarta (Sekarang gedung Agung). Tampak hiasan bulu-bulu di kepala	119
3.24	Beberapa musisi dari Korps Musik Barat Kraton Yogyakarta berseragam lengkap beserta instrumen pada Maret 1923	121
3.25	Gubernur Bijleveld dan Sultan HB VIII berjalan bergandengan, diikuti oleh juru bahasa di belakangnya, selama kunjungan gubernur ke keraton Yogyakarta	122
3.26	Gubernur Jenderal Bijleveld dan Sultan HB VIII selama kunjungan gubernur ke keraton Yogyakarta. Mengenakan kebaya berwarna putih, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun	123
4.1	HB VIII dan Residen L.F. Dingemans, merayakan hari jadi ke-60 PG. Gesiekan	130
4.2	Perjamuan di keraton Yogyakarta” (dalam foto : (dua dari kiri) Ratoe Timoer, (enam dari kiri) HB VIII, (tujuh dari kiri) Gubernur Jenderal Yogyakarta, J. Bijleveld, (sembilan dari kiri) Ratoe Pembajoen, (sebelas dari kiri) Paku Alam VII, (dua belas dari kiri) Mangkunegoro VII	134
4.3	Salah satu pementasan tari di keraton Yogyakarta	138

4.4	HB VIII dalam sebuah perjamuan di keraton, terlihat sedang bersiap untuk bersulang dengan para tamu yang hadir	140
4.5	Pentas <i>wayang wong</i> dengan lakon Jaya Semadi dan Sri Suwela yang diselenggarakan pada 3,4,5,6 september 1923 di Keraton Yogyakarta	142
4.6	Menerima kedatangan Gubernur Jenderal B.C de Jonge dan istri di Keraton Yogyakarta	143
4.7	HB VIII berjalan bergandengan dengan residen Yogyakarta, di belakangnya diikuti penterjemah	144
4.8	Pelantikan Dorodjatun sebagai sultan Yogyakarta, Hamengku Buwono IX. Di sebelahnya gubernur Yogyakarta, Lucien Adam.	151
4.9	HB IX duduk di singgasana sultan pasca resmi diangkat menjadi Sultan Yogyakarta, dengan Gubernur Yogyakarta, Lucien Adam, duduk di sebelah kirinya	151

## DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
3.2	Data pentas wayang wong di keraton Yogyakarta	102

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	<i>Acte van verband</i> 1921	174
B	Tata ruang dan bangunan kawasan inti keraton Yogyakarta	180
C	<i>Pranatan Lampah-lampah Badhe Rawoehipun Kangdjeng Toewan Ingang Witjaksono Goepernoer Generaal Ing Nederlandse-Indie Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkeborgh Stachouwer sarta Kandjeng Njonjah wonten ing Nagari Dalem Ngajogjakarta</i>	185
D	Kronologi proses pengangkatan Pangeran Puruboyo sebagai Sultan HB VIII	195
E	Data makanan favorit ( <i>kersanan dalem</i> ) sultan HB VIII	198
F	Tabel-tabel (Klasifikasi penduduk Eropa di Yogyakarta berdasar profesi dan Jumlah penduduk Eropa di Yogyakarta tahun 1925)	200

## ABSTRAK

Melalui metode sejarah, skripsi ini mengkaji tentang Diplomasi Kebudayaan antara keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda pada masa pemerintahan Hamengku Buwono VIII, dari 1921 sampai dengan 1939. Aspek kebudayaan dipergunakan sebagai taktik politik lunak yang diharapkan dapat melancarkan aspirasi keraton yang ketika itu mengalami tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial.

Dalam perkembangannya, istilah diplomasi kebudayaan belum terlalu familiar ketika temporal skripsi ini berlangsung, namun pelaksanaannya telah diberlakukan dan banyak diterapkan dalam konsep menjamu tamu besar, baik di keraton maupun lembaga institusi di bawahnya. Melalui jamuan yang baik dan mewah diharapkan diskusi maupun kompromi dapat berjalan dengan lebih lancar dan berpotensi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Keraton sebagai simbol pusat kebudayaan Jawa yang Adiluhung tentu memiliki tuntutan untuk menampilkan keluhuran aspek kebudayaannya melalui kesenian, arsitektur, hingga kuliner. Beragam aspek tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah rangkaian jamuan yang mengesankan bagi para tamu Belanda yang hadir. Parade kebudayaan dianggap dapat menjadi daya tarik sekaligus media yang strategis untuk menimbulkan kesan bersahabat sekaligus penghargaan berupa seremonial penyambutan tamu keraton yang hadir memenuhi undangan keraton.

Rangkaian seremonial kebudayaan yang diselenggarakan di keraton Yogyakarta bertujuan untuk mensukseskan jalannya suksesi tahta. Hal ini juga berlaku pada masa pemerintahan HB VIII yang ketika itu telah mengupayakan untuk memajukan pentas kesenian *wayang wong* sebagai salah satu media ekshibisi kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi penikmatnya (khususnya para tamu pembesar Belanda) sekaligus mampu menciptakan situasi politik yang kondusif hingga berhasil mengantarkan calon pengganti Sultan berhasil naik tahta tanpa intervensi berlebih dari pihak pemerintah kolonial.

## **ABSTRACT**

*Through historical methods this research discusses about cultural diplomacy between keraton Yogyakarta and Dutch Colonial Government during the reign of Sultan Hamengku Buwono VIII, from 1921 until 1939. Cultural aspect used as a soft political tactic that expected to accelerate keraton's aspirations, which that time is going through pressures and restrictions from colonial government.*

*In the progress, cultural diplomacy term is not really familiar when this research's temporal happened, but the execution already enforceable in the form of receive the guest in the keraton nor the institution below it. Through the favourable and luxurious dinner, it's hoped that the discussion or the compromise could going smooth and have more potencial to be advantageous for both sides. Keraton as a symbol of java's noble culture in a demand to show the nobleness aspect of their cultures through arts, architectures, to culinary. Those various aspect supposed to form a banquet sequences that can impress the guest. Cultural parade rated both as an attraction and a strategic medium to work on a friendly state outright a honour in the form of welcoming ceremonial for the guest that attend the invitation from keraton.*

*Cultural ceremonial which held by keraton Yogyakarta head for help the path of succession. It's also happen during the reign of HB VIII, which that time already tried to set on wayang wong's performance art as one of cultural exhibition's media that expected to be an attraction for the guest, also capable to create a conducive political situation that success to actualize the succession of throne without going through more intervention from colonial government.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Keraton Yogyakarta merupakan warisan dari kerajaan kuno yang berpusat di Pedalaman pulau Jawa yaitu Kerajaan Mataram Islam. Keberadaan keraton Yogyakarta sebagai sentra kebudayaan Jawa yang Adiluhung dan klasik ini, tentu sangat menarik di tengah kemajuan zaman yang mengagungkan teknologi dan modernitas. Keraton Yogyakarta bagi masyarakat pendukungnya, diyakini sebagai orientasi atau pusat dari perkembangan kebudayaan. Di sanalah terdapat kebiasaan sehari-hari yang telah melembaga dan senantiasa diupayakan pelestariannya secara turun temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Keraton diyakini sebagai *role-model*, wadah ‘digodoknya’ kebudayaan-kebudayaan penuh estetika yang berbeda dengan lingkungan masyarakat biasa yang tinggal di luar Keraton. Kebudayaan Keraton mencakup segala aspek kehidupan seperti; bentuk arsitektur, kendaraan, pakaian atau seragam kebesaran, kesenian, laku ritual, kesusastraan hingga makanan. Kebudayaan keraton diyakini sebagai kebudayaan yang luhur karena mengandung filosofi-filosofi keyakinan hidup orang Jawa, yang berfungsi sebagai nilai-nilai panutan untuk menjalani hidup bagi orang Jawa sendiri. Fungsi tersebut diyakini dengan sepenuh hati oleh segenap masyarakat Keraton Yogyakarta. Dalam perkembangannya, berbagai bentuk kebudayaan yang berkembang dan terus dilestarikan di keraton Yogyakarta tidak luput dari pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar keraton. Meskipun begitu, pengaruh kebudayaan tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai budaya Jawa yang telah mengakar dengan kuat karena sarat dengan filosofi kehidupan, dan pada saat yang sama juga diliputi dengan kepercayaan akan unsur magis yang melingkupi seluruh wilayahnya.

---

<sup>1</sup>Noor Sulistyو Budi,dkk., *Tradisi Makan dan Minum di Lingkungan Keraton Yogyakarta*. (Daerah Istimewa Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan nilai-nilai Budaya, 1997), hlm.4.

Sejak berabad-abad lalu, keberadaan Pulau Jawa telah dikenal sebagai sebuah kawasan yang berkembang dan mengalami perubahan dalam segi sosial budaya karena memperoleh pengaruh kebudayaan Hindhu-Buddha, Islam dan Kristen. Perkembangan dan perubahan sosial budaya ini terjadi karena ada interaksi antara budaya-budaya yang hidup di kawasan yang sama. Dapat diambil contoh, pembauran kebudayaan antara kebudayaan Jawa asli dan kebudayaan Eropa yang merupakan kebudayaan pendatang. Akibat dari pembauran kebudayaan ini dapat dilihat dari corak kehidupan budaya di Jawa yang banyak terpengaruh kebudayaan Barat.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, kebudayaan Keraton Yogyakarta juga tidak luput dari arus pembaratan (*westernization*) yang terjadi di Pulau Jawa. Kebudayaan yang masuk ke lingkungan Keraton datang bersamaan dengan kehadiran masyarakat pendukungnya, percampuran kebudayaan merupakan hal yang mustahil dihindari. Pernyataan tersebut dapat dikorelasikan dengan pendapat Denys Lombard mengenai Mentalitas Nebula (*něbuleuses mentales*) yang mempersoalkan tentang realitas persinggungan budaya antara budaya Jawa dan budaya barat, sebagai akibat dari penerapan politik asosiasi pada awal abad ke-20.<sup>3</sup> Politik asosiasi ini berpengaruh terhadap kehidupan para elite pribumi dalam mengadopsi nilai-nilai budaya barat, seperti yang tampak dalam aktivitas makan mereka, baik di rumah maupun dalam perhelatan jamuan makan dengan orang-orang Belanda.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jawa, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan keraton,

---

<sup>2</sup> D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. (Jakarta : Bhatara,1983), hlm 1.

<sup>3</sup>Denys Lombard, *Nusa Jawa : Silang Budaya (Batas – Batas Pembaratan)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.9.

<sup>4</sup>Fadly Rahman, *Rijstaffel : Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.9.

memiliki sikap *open minded tolerance* atau *savoir vivre* dalam menyikapi keberadaan kebudayaan asing yang hadir dalam segala bidang kehidupannya.<sup>5</sup>

Keberadaan Pemerintah Kolonial Belanda tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konsep feodalisme yang sudah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Ciri feodalisme dapat dilihat pada struktur hierarki masyarakat, yang terdiri atas para penguasa (raja-raja dan priyayi) dan rakyat petani, yang masih kuat melekat. Feodalisme yang sudah subur dalam alam pikiran masyarakat pribumi, dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui perantaraan pejabat-pejabat pribumi yang memperoleh ketaatan dan penghormatan dari masyarakat tanpa perlu diminta.<sup>6</sup> Kemudian menjadi wajar, jika pemerintah Kolonial Belanda berusaha untuk menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin pribumi. Karena dengan begitu, akan lebih mudah menjangkau dan menggerakkan masyarakat untuk mengikuti kebijakan mereka.

Selain itu, wujud lain dari feodalisme dapat dilihat pada gaya hidup kebangsawanan yang berasal dari kebudayaan keraton serta bentuk kehidupan yang telah dipengaruhi gaya hidup keningratan.<sup>7</sup> Gaya hidup golongan bangsawan pribumi tidak lepas dari proses *westernisasi* sebagai akibat kontak intensif antar unsur-unsur kebudayaan yang didukung oleh elite birokrat, elite ekonomi, serta elite pribumi yang lebih mengarah kepada dominasi kebudayaan Barat atas kebudayaan agraris tradisional.<sup>8</sup> *Westernisasi* tersebut menyebabkan perubahan pada tata nilai, perilaku maupun gaya hidup pada masyarakat Jawa.

Salah satu pengaruh budaya borjuasi Eropa tampak dari semakin banyaknya peredaran makanan kaleng dan impor. Sejak itu mulai dikenal berbagai jenis makanan modern Barat seperti *spekkoek*, *koningskroon*, bolu, biskuit, roti kalengan,

---

<sup>5</sup>Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis : Dari zaman Kompeni sampai Revolusi*. (Depok : Komunitas Bambu, 2014), hlm.9.

<sup>6</sup>Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi (The Making of a Bureaucratic Elite)*. (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 28.

<sup>7</sup>Fadly Rahman, *Rijstaffel : Budaya Kuliner*, hlm.17.

<sup>8</sup>W.F. Weirtheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi : Studi Perubahan Sosial*. (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999), hlm.35.

tart, *beefsteak*, *sop*, *frikaddel*, *sosis*, dan sebagainya.<sup>9</sup> Selain makanan, pengaruh budaya Barat dalam gaya hidup kaum elite pribumi sampai menjangkau pada konsumsi minuman keras.<sup>10</sup> Jenis minuman kerasnya bahkan beragam, mulai dari kaum elite pribumi hingga rakyat biasa, dan tergantung pada harga yang ditawarkan. Pada masa itu telah dikenal pula berbagai minuman keras dan *softdrink* yang dikemas dalam botol seperti *whiskey*, *anggur*, *cognag*, *bier*, *bier* hitam, *lemonade*, air Belanda, sari buah, *siroop*, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Kehadiran orang-orang Eropa dalam kehidupan masyarakat Jawa memunculkan sebuah tatanan atau struktur sosial yang baru. Pergaulan yang terjadi antara orang-orang Eropa dan elite pribumi berpengaruh pada masuknya gaya hidup Barat ke dalam lingkungan istana. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, pengaruh budaya Barat yang mempengaruhi kebudayaan yang berkembang di keraton Yogyakarta telah banyak terjadi, walaupun secara penerimaan masih diwarnai pro dan kontra dari berbagai kalangan di keraton.

Keberadaan para pegawai Eropa dalam lingkaran feodalisme para Priyayi mendorong interaksi dan percampuran kebudayaan antara keduanya. Hampir semua aspek kehidupan elite pribumi kemudian meniru gaya hidup Barat, dari mulai aspek pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya.<sup>12</sup> Interaksi-interaksi yang terjadi

---

<sup>9</sup>Bedjo Riyanto, *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*. (Yogyakarta : Tarawang, 2000), hlm.52.

<sup>10</sup>Awal keterlibatan pemerintah Hindia-Belanda dalam hal produksi dan perdagangan minuman keras berawal pada 1873 dan berakhir pada 1898. Peraturan pada 1873 dimuat dalam staatsblad No. 254, 255,257 tahun 1873 yang menyebutkan bahwa minuman keras berada di bawah wewenang *Departement van Financien* (Departemen Keuangan), terutama Dinas Bea dan Cukai. Dinas tersebut mengawasi proses produksi arak, mengawasi peralatan dan tanah yang digunakan, tujuannya adalah menjaga kualitas arak dengan baik. Lihat Yusana Sasanti Dadtun, *Minuman Keras di Batavia akhir abad XIX*. (Yogyakarta : Ombak, 2016), hlm. 61.

<sup>11</sup> Baha'udin, "Westernisasi dan gaya hidup Bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada masa Paku Alam V", Jurnal *Patrawidya* seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya Vol.15 No.3 (Yogyakarta, September 2014), hlm.342.

<sup>12</sup>Baha'udin, "Westernisasi dan gaya hidup Bangsawan...", hlm. 343.

hampir setiap hari antara golongan Priyayi dan para penguasa atau pegawai Eropa, persinggungan kebudayaan dalam menjalani rutinitas keseharian atau gaya hidup masing-masing, ditambah dengan perluasan pendidikan dasar menjadi alasan mengapa perubahan dalam masyarakat yang heterogen ini dapat terwujud.<sup>13</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang peristiwa Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, *Pisowanan agung/* jamuan agung keraton untuk tamu-tamu kehormatan dari Belanda sering diselenggarakan.<sup>14</sup> Beragam pertunjukkan seni seperti pertunjukan *wayang wong*, tari, penyajian minuman alkohol dan jamuan dengan menu makanan perancis<sup>15</sup>, diperuntukkan bagi tamu-tamu Eropa sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan.<sup>16</sup> Pelayanan dan penyajian hidangan yang mewah dan lezat merupakan simbolisasi penghargaan bagi tamu yang datang. Tidak terlampau berlebihan jika kuliner digunakan sebagai alat diplomasi, karena pada dasarnya kuliner tidak terlalu menampakkan kepentingan para penguasa keraton pada waktu itu, tetapi kuliner dapat menjadi alat diplomasi yang membawa misi damai. Keadaan yang damai tanpa friksi tentu lebih memungkinkan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Interaksi budaya dalam perjamuan makan memungkinkan terjadinya adaptasi atas pengaruh budaya yang terlibat di dalamnya. Pernyataan tersebut dapat digambarkan dengan fenomena penyuguhan bir untuk tamu Eropa yang datang dalam perjamuan yang diadakan di keraton Yogyakarta. Budaya minum bir bukan sebuah kebiasaan yang berkembang di kalangan keraton Yogyakarta dan masyarakat

---

<sup>13</sup>Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia (The Emergence of the modern Indonesian Elite)*. (Jakarta : Pustaka Jaya,1984), hlm. 42-43.

<sup>14</sup> “Cerita Keraton Yogya kecoh Belanda lewat Kuliner”, (<https://m.tempo.co/read/news/2014/12/01/201625529/cerita-keraton-yogya-kecoh-belanda-lewat-kuliner>, dikunjungi pada Jumat, 14 April 2017 pukul 14:18).

<sup>15</sup>Susanto, “Wayang wong dan tahta : Suatu Kajian tentang politik kesenian HB VIII 1921-1939” (Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996), hlm. 182.

<sup>16</sup>Wawancara dengan KRT. Rintaiswara, tanggal 24 November 2016.

Jawa pada umumnya. Orang Pribumi tidak mengkonsumsi minuman keras, berbeda dengan orang-orang Eropa yang memiliki kecenderungan sebagai alkoholik.<sup>17</sup>

Adaptasi dapat dilihat pada usaha untuk menghargai sebuah pola kebudayaan yang bertolak belakang dengan kebudayaan yang berkembang di Keraton sendiri. Bentuk penyesuaian atau adaptasi kebudayaan itu ditunjukkan antara lain dengan racikan minuman yang dapat dihidangkan dan diminum bersama dengan tamu Belanda yang *sowan* ke keraton. Pada waktu itu, bir diimpor dari luar negeri dan untuk sampai ke Hindia Belanda sendiri memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga bir Jawa sebagai minuman yang disuguhkan bagi pihak keraton dianggap sebagai jalan tengah yang masuk akal untuk memenuhi kepentingan jamuan.<sup>18</sup>

Bila mengacu pada pernyataan di atas, telah terjadi sebuah adaptasi kebudayaan yang dilakukan pihak Keraton terhadap para tamu orang Belanda yang diundang dalam perjamuan atau *Pisowanan Agung*. Tradisi menjamu dengan bir Jawa masih dilakukan pada masa HB VIII. Bahkan, Sang Sultan terkenal sering mengadakan jamuan kenegaraan. Namun, pengaruh kebudayaan barat jauh lebih kental. Hal ini terlihat dari aksi *toast* ketika akan menikmati bir Jawa.<sup>19</sup> Aksi *toast* atau bersulang pada perjamuan atau *Pisowanan Agung* dilakukan untuk mendoakan kejayaan dan panjang umurnya Ratu Belanda.<sup>20</sup>

Usaha diplomasi dalam mencapai kesepakatan demi kepentingan rakyat bukan hal baru yang ditempuh oleh Keraton. Sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II, Keraton Yogyakarta telah menghadapi pergolakan politik internal, karena gencarnya intervensi Belanda dalam urusan pemerintahan di

---

<sup>17</sup>Anik Susanti, “Akulturasi Budaya Belanda dan Jawa (Kajian Historis pada kasus kuliner sup dan Bistik Jawa Tahun 1900-1942)” ,e-journal Pendidikan Sejarah AVATARA Vol.1 No.3 (Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Oktober 2013), hlm.453.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Prof.Ir.Dr. Murdjati Gardjito, tanggal 3 Juni 2016.

<sup>19</sup>Film “Kersanan Ndalem” (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Oranye Production, 2014), menit ke 24 : 42 – 25 : 09.

<sup>20</sup>Wawancara dengan KRT. Rintaiswara, tanggal 24 November 2016.

Keraton Yogyakarta. Upaya untuk mempertahankan kepentingan masing-masing dapat dicapai melalui jalan diplomasi atau perundingan. Akan tetapi, tidak jarang upaya perundingan dengan jalan damai menemui kegagalan, sehingga mengharuskan keduanya terlibat dalam peperangan.

Secara umum, kondisi politik yang tidak stabil tidak hanya dialami oleh daerah-daerah *Vorstenlanden*, tapi juga dialami oleh sebagian besar daerah lain di Nusantara yang merupakan koloni Belanda. Kenyataan bahwa aspirasi dan kecenderungan pribadi penduduk asli ditentukan oleh kekuatan luar menunjukkan ironi sebuah negeri yang tidak dapat merasakan kemerdekaan di tanahnya sendiri.<sup>21</sup> Kondisi politik yang tidak stabil sudah terjadi jauh sebelum Keraton Yogyakarta terbentuk. Ketidakstabilan politik tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik secara *ekstern* maupun *intern*. Faktor *ekstern* dari terciptanya ketidakstabilan politik di lingkungan Keraton Yogyakarta adalah kehadiran pihak Belanda sebagai ‘orang luar’ yang hidup di tengah-tengah budaya Keraton. Kehadiran orang-orang Belanda di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa telah memunculkan sebuah tatanan atau struktur sosial yang baru. Interaksi yang terjadi diantara kedua bangsa itu membawa pengaruh masuknya cara hidup barat ke dalam lingkungan keraton. Tidak jarang kebiasaan dan pandangan hidup yang berbeda antara keduanya menimbulkan konflik. Seperti misalnya, kebiasaan minum-minuman beralkohol yang merambah kepada para bangsawan hingga ke masyarakat umum yang menimbulkan keresahan dan kekecewaan dari golongan agama istana.<sup>22</sup> Berikutnya faktor *intern* yang menjadi faktor pendorong terciptanya ketidakstabilan politik di lingkungan keraton, seperti misalnya, pertentangan yang terjadi antara sesama bangsawan terkait perebutan tahta maupun jabatan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Rauws Joh., H. Kraemer, F.J.F van Hasselt, N.A.C. Slotemaker De Bruine, *The Netherlands Indies* (New York : World Dominion Press ,1935), hlm.86.

<sup>22</sup>A. Kardiyat Wiharyanto, “Perlawanan Indonesia terhadap Belanda pada abad XIX” (Makalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP- Universitas Sanata Dharma Yogyakarta), hlm. 11.

<sup>23</sup>Dwi Eriska Agustin, “Pengaruh Mitos “Ratu Adil” dalam Perang Jawa (1825-1830)” (Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2009), hlm.13.

Pengaruh barat yang masuk ke lingkungan keraton mencakup banyak bidang yang satu dan lainnya saling berkesinambungan. Dari segi sosial ekonomi, modal barat yang masuk melalui sewa tanah menciptakan perubahan pendapatan bagi para bangsawan pemilik tanah. Para bangsawan yang terbiasa memperoleh upeti dari kerja wajib rakyatnya, kini mulai memperoleh uang dari hasil penyewaan tanah pada para investor barat. Perubahan di bidang sosial ekonomi ini, berpengaruh pada gaya hidup para bangsawan yang setelah banyak bergaul dengan orang barat menjadi berubah tingkat konsumerismenya. Uang yang didapatkan dari sewa tanah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup para bangsawan yang bermewah-mewahan.<sup>24</sup>

Interaksi antara orang-orang Belanda dan para aristokrat tidak seimbang, karena salah satu pihak menjadi pihak yang lebih superior, sehingga diutamakan kesenangan dan kenyamanannya. Contohnya, kegiatan pelelangan (*vendutie*) yang diadakan oleh suatu lembaga Hindia Belanda pada abad ke-19 untuk menjual barang-barang seorang pejabat Belanda yang akan pindah ke tempat lainnya. Dalam pelelangan ini biasanya para bangsawan atau priyayi membeli barang-barang dari para pejabat Belanda tersebut dengan harga yang sangat tinggi sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat Belanda yang akan pergi. Selain acara lelang, para pejabat Belanda itu menyaksikan sendiri kelayakan yang ditunjukkan oleh para bangsawan dan priyayi dengan penyediaan *champagne* yang tidak terbatas, dilanjutkan dengan *rijsttafel* yang disediakan oleh priyayi setempat pasca acara lelang selesai.<sup>25</sup>

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa para bangsawan atau aristokrat memiliki hubungan yang dekat dengan raja-raja Jawa, sehingga lazim jika ditemui kesamaan pola sikap para aristokrat dalam menunjukkan penghormatan terhadap perwakilan dari pemerintahan Belanda. Senada dengan kebiasaan Keraton Yogyakarta yang melakukan *toast* atau bersulang untuk kejayaan kerajaan Belanda, mempersiapkan resepsi-resepsi bergaya Eropa untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting bagi Belanda seperti Ulang Tahun Ratu, kedatangan hingga kepindahan

---

<sup>24</sup>Baha'udin, "Westernisasi dan gaya hidup Bangsawan...", hlm.341.

<sup>25</sup>Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi....*, hlm.91.

Residen, para bangsawan atau aristokrat pribumi juga sering melakukannya—jika tidak ingin dikatakan wajib.<sup>26</sup> Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh keraton dan para bangsawan bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda sekaligus memuluskan tuntutan atau aspirasi tertentu yang dimilikinya.<sup>27</sup>

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, muncul ketertarikan untuk membahas lebih jauh tentang Diplomasi Kebudayaan antara Keraton dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII. Untuk meneliti hal itu, dikemukakan permasalahan sebagai berikut. Perubahan ke arah pola pikir yang moderat dan visioner oleh Sultan Hamengku Buwono VIII merupakan hasil dari pendidikan dan wawasan para Pangeran ditambah dengan akses yang diberikan Ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono VII<sup>28</sup>, yang beranggapan bahwa kebudayaan Barat dan kebudayaan Jawa dapat saling menyesuaikan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai aslinya.<sup>29</sup> Itulah mengapa ia menginginkan semua puteranya dididik sebagai anak orang biasa tanpa mendapat perlakuan istimewa sejak kecil. Sejak kecil, putera-puteranya di-*indekost*-kan di keluarga Belanda, terutama dari Kalangan Guru di Yogyakarta, dengan harapan agar putera-puteranya dapat menyerap kebiasaan hidup sederhana dan disiplin dari orang-orang Belanda.<sup>30</sup> Meskipun mendapatkan didikan barat, putera-putera Sultan Hamengku Buwono VIII tetap memperoleh pendidikan di sekolah internal keraton

---

<sup>26</sup>Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi....*, hlm.62.

<sup>27</sup>Film “Kersanan Ndalem” (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Oranye Production, 2014), menit ke 24:00 – 24:42.

<sup>28</sup>Perubahan politik dan budaya terjadi semasa pemerintahan Sultan HB VII. Menurut, Prof.Murdjiati Gardjito, HB VIII terkena imbas dari pelaksanaan kebijakan politik baru dari HB VII. Dia kemudian meneruskan dengan mengirim anak-anaknya ke luar untuk menyerap kebudayaan Belanda. Namun sebenarnya yang pertama kali mengeluarkan Bangsawan dari keraton untuk memperluas wawasan mereka adalah HB VII. (Wawancara dengan Prof.Ir.Dr. Murdjiati Gardjito, tanggal 3 Juni 2016).

<sup>29</sup>Susanto, “Wayang wong dan tahta....”, hlm.72.

<sup>30</sup>Tempo, “*Hamengku Buwono IX : Pengorbanan sang Pembela Republik*”, (Jakarta : PT. Gramedia, 2015), hlm. 35

yang mengasah rasa, kepribadian, pitutur, dan berbagai etiket adat tradisi.<sup>31</sup> Ini membuktikan bahwa meski terkesan kebarat-baratan, Sultan Hamengku Buwono VIII tetap mempertahankan etiket dan tradisi Jawa dalam mendidik putera-puteranya, semua itu dalam rangka mempersiapkan putera-puterinya dalam menghadapi zaman yang akan jauh berbeda.

Berdasarkan permasalahan di atas, upaya untuk memahami pelaksanaan diplomasi kebudayaan antara Keraton dan Pemerintah Kolonial Yogyakarta dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang historis hubungan harmonis yang terjalin antara keraton dan pemerintah kolonial Belanda?
2. Mengapa dilakukan diplomasi kebudayaan? Bagaimana proses diplomasi kebudayaan di Keraton Yogyakarta?
3. Apa sajakah saluran-saluran yang digunakan dalam proses diplomasi kebudayaan antara keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda?
4. Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam saluran-saluran diplomasi kebudayaan tersebut? Bagaimana solusi pihak keraton atas hambatan-hambatan tersebut?

## **B. Ruang Lingkup**

Penelitian sejarah perlu dibatasi oleh ruang lingkup temporal, spasial, dan keilmuan. Pembatasan ruang lingkup dianggap sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian karena dengan menentukan ruang lingkup, seorang peneliti lebih dapat berfokus pada topik yang ditelitinya.

Lingkup temporal skripsi ini adalah antara 1921 sampai dengan 1939. Tahun 1921 dipilih sebagai awal kajian dengan alasan bahwa tahun 1921 adalah awal dari masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII; sedangkan tahun 1939 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII telah berakhir. Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII dipilih karena beliau merupakan :

---

<sup>31</sup>Tempo, "*Hamengku Buwono IX.*", hlm. 39.

- a) salah satu pangeran yang terkena imbas dari kebijakan Sultan Hamengku Buwono VII yang mendorong para bangsawan agar memperoleh pendidikan di luar istana. Akses yang diberikan padanya untuk menuntut ilmu tentang kebudayaan Barat sampai ke Belanda mendorong terbentuknya pola pikirnya yang visioner dan moderat. Pola pikir inilah yang membedakan dengan Sultan-sultan sebelumnya.
- b) raja yang visioner dalam menghadapi kondisi keraton yang masih belum lepas dari tekanan pihak kolonial Belanda, sehingga ia berusaha untuk mencari cara baru untuk mengatasi intervensi-intervensi pihak kolonial Belanda atas keraton. Pada masa pemerintahannya, intensitas pentas seni meningkat dan bisa dikatakan mencapai masa keemasannya. Dalam rangkaian pentas seni itu, disediakan jamuan untuk tamu-tamu pembesar Belanda yang hadir. Hal ini dapat diduga sebagai upaya penggunaan seremoni-seremoni kebudayaan untuk mencapai keadaan yang stabil bagi Keraton untuk menyuarkan tuntutan atau aspirasinya.

Selain itu pada masa pemerintahannya, mulai bermunculan dan berkembang gerakan nasionalisme partai (SI, PNI, Partindo, PKI) yang pertumbuhannya meresahkan pihak pemerintah Kolonial Belanda, sehingga mendorong Sultan untuk mengeluarkan larangan bagi segenap warga Yogyakarta mengikuti perkumpulan atau partai-partai tersebut. Sebagian *abdi dalem* keraton yang telah bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut, setelah keluar larangan Sultan, kemudian beralih menjadi seniman wayang *wong*. Beralihnya para abdi dalem keraton ke bidang seni peran wayang *wong*, mendorong produktivitas pementasan pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII yang intensitasnya meningkat bila dibandingkan dengan masa-masa Sultan sebelumnya.<sup>32</sup>

Fokus penelitian ini adalah diplomasi kebudayaan antara keraton dan pemerintah kolonial Belanda. Perwujudan Diplomasi Kebudayaan antara keduanya tampak dalam jamuan-jamuan yang diselenggarakan keraton dengan mengundang pembesar-pembesar Belanda. Selain itu, peringatan hari-hari penting Belanda yang

---

<sup>32</sup>Susanto, "Wayang wong dan tahta....", hlm.120-121.

dihadiri oleh Sultan dan segenap pengikutnya dapat dikelompokkan dalam upaya penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya dari keraton kepada Pemerintah Belanda, seperti pidato dari para Pembesar berupa ucapan selamat ulang tahun kepada Ratu Wilhelmina atau disebut juga *openbaar gehoor*. Pada puncak acara yang diselenggarakan pada malam hari atau *gala receptie* yang diselenggarakan di Istana Gubernuran, Sultan mengirimkan rombongan Tari Bedaya—bahkan di Keraton Tari Bedaya jarang dipentaskan—beserta gamelan pengiringnya.<sup>33</sup>

Lingkup Spasial merupakan suatu batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administratif tertentu yang dapat meliputi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Batasan lingkup spasial penelitian ini adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lingkup Keilmuan adalah batasan aspek keilmuan yang akan dibahas dalam skripsi. Karena fokus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah diplomasi kebudayaan antara keraton dan pemerintah kolonial Belanda, lingkup keilmuan skripsi ini dapat dikategorikan sebagai sejarah politik dan sejarah kebudayaan. Dilihat dari sudut pandang politik, penelitian ini mengkaji hubungan diplomatik antara keraton dan Pihak Kolonial Belanda sebagai akumulasi dari berbagai tuntutan-tuntutan sosial yang muncul akibat penetrasi dan intervensi Belanda di lingkungan keraton.

Selanjutnya, aspek kebudayaan disimbolkan dengan seremoni-seremoni kebudayaan yang terdiri atas atraksi atau *performance* kebudayaan yang termasuk dalam rangkaian acara perjamuan yang diselenggarakan keraton Yogyakarta. Seremoni-seremoni kebudayaan tersebut diperuntukkan bagi tamu-tamu perwakilan dari Belanda yang datang memenuhi undangan Keraton sebagai tamu kehormatan.

Dalam penelitian ini, seremoni-seremoni yang diselenggarakan oleh keraton merupakan alat atau saluran pelaksanaan diplomasi Kebudayaan di keraton Yogyakarta. Secara umum, proses diplomasi kebudayaan antara keraton dan pemerintah kolonial Belanda merupakan bagian dari pembahasan tentang sejarah politik kebudayaan.

---

<sup>33</sup>Susanto, “Wayang wong dan tahta....”, hlm.119.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, permasalahan, dan batasan Ruang Lingkup di atas, dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

*Pertama*, menjelaskan latar belakang historis dari hubungan harmonis yang terjalin antara keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial Belanda sebelum masa pemerintahan HB VIII. *Kedua*, menjelaskan proses berlangsungnya diplomasi kebudayaan di keraton Yogyakarta, sekaligus juga menjelaskan alasan mengapa perlu diberlakukan diplomasi kebudayaan dalam melancarkan tuntutan atau aspirasi keraton terhadap pihak Belanda. *Ketiga*, mendeskripsikan saluran-saluran yang dipergunakan dalam proses diplomasi Kebudayaan di keraton Yogyakarta berikut dengan upaya-upaya yang dilakukan pada masa pemerintahan HB VIII untuk mewujudkan pelaksanaan diplomasi tersebut. *Keempat*, mengungkapkan hambatan-hambatan berikut solusi atau hasil yang ditemui dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan melalui saluran-saluran tersebut.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber pustaka yang dianggap relevan dan dapat membantu memperluas wawasan dalam mempertajam analisis. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan tinjauan terhadap beberapa sumber pustaka. Penelitian tentang Diplomasi Kebudayaan dengan menggunakan sudut pandang sejarah belum banyak dilakukan, ditambah dengan fakta menarik untuk dikaji lebih jauh terkait kebudayaan yang dipergunakan oleh Keraton sebagai alat diplomasi untuk mewujudkan tujuan atau aspirasinya kepada pihak pemerintah kolonial Belanda. Literatur berupa hasil penelitian ilmiah seperti skripsi dan literatur tercetak seperti buku maupun jurnal juga digunakan sebagai bahan acuan dan telaah dalam penulisan skripsi ini.

Pustaka pertama yang digunakan adalah Disertasi Universitas Gadjah Mada yang berjudul *Pengaruh bentuk pemerintahan 'pseudoabsolutisme' pasca perjanjian Giyanti 1755 terhadap perkembangan tari Jawa gaya Yogyakarta*. Disertasi ini menjabarkan tentang konsep 'pseudoabsolutisme' yang merupakan istilah pinjaman

dari konsep monarki absolut yang ada di Eropa. Konsep ‘pseudoabsolutisme’ yang tercermin dalam pola pemerintahan keraton Yogyakarta dikarenakan konsep monarki absolut tidak sepenuhnya dilaksanakan di keraton. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menghadapi kenyataan bahwa masih ada kekuatan yang lebih menentukan keputusan maupun kebijakan yang diterapkannya yaitu pemerintah kolonial Belanda. Posisi dominan yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda atas keraton Yogyakarta tidak terlepas dari bantuan sebagai pihak yang menengahi konflik antara PB III dan HB I menjelang pendirian keraton Yogyakarta sebagai kerajaan otonom.

Disertasi ini mencoba menunjukkan pengaruh dari pemerintahan yang semi absolut di keraton Yogyakarta terhadap perkembangan tari Jawa gaya Yogyakarta. Dengan adanya konsep pseudoabsolutisme secara bertahap dari masa pemerintahan sultan yang satu ke sultan yang lain, terjadi perkembangan yang fluktuatif terkait atribut ataupun rangkaian seremonial yang diselenggarakan di keraton. Dari disertasi ini dapat dilacak tentang penyelenggaraan perjamuan tamu-tamu Belanda di keraton Yogyakarta yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Gambaran perkembangan hubungan politik dan implementasinya terhadap hubungan keraton dengan pemerintah Belanda sangat membantu untuk menempatkan pola dan pandangan terkait diplomasi kebudayaan yang dicanangkan pada masa pemerintahan Sultan HB VIII.

Pustaka yang kedua adalah sebuah buku yang berjudul *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*<sup>34</sup> karya Vincent J.H. Houben. Buku ini menjabarkan hubungan yang terjalin antara *Vorstenlanden* (Surakarta dan Yogyakarta) dan pihak kolonial Belanda. Hubungan maupun interaksi yang terjalin antara keduanya tidak terbatas pada bidang politik saja—meskipun pada kenyataannya interaksi politik adalah yang paling mendominasi—namun juga mencakup bidang - bidang kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial-budaya, agama.

---

<sup>34</sup>Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kompeni : Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. (Yogyakarta : Bentang Budaya, 2002)

Pada dasarnya dorongan penyelenggaraan kegiatan ekonomi menyebabkan interaksi antara pihak Belanda dan keraton menjadi intensif. Bidang-bidang kehidupan keraton lain seperti sosial-budaya dan agama juga tidak luput dari intervensi Belanda. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran pihak Belanda dalam upacara-upacara tradisional atau keagamaan yang diselenggarakan di Keraton. Peranan Belanda sebagai tamu kerajaan digarisbawahi sebagai sebuah bagian yang harus ada demi kelangsungan sebuah acara yang diselenggarakan oleh keraton. Dinamika hubungan antara keraton dan kompeni dijabarkan dalam buku ini, dari permasalahan keamanan sekelas perompakan di perbatasan wilayah sampai dengan masalah yang bersifat mendesak seperti suksesi tahta keraton. Memahami literatur ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh gambaran tentang hubungan antara keraton dan pihak Belanda, yang berguna dalam meletakkan pola pikir tentang diplomasi kebudayaan sebagai media penting untuk mencapai kondisi stabil yang diharapkan.

Pustaka ketiga adalah Tesis Universitas Gadjah Mada yang berjudul *Wayang Wong dan Tahta : Suatu Kajian tentang Politik Kesenian HB VIII (1921-1939)*<sup>35</sup> karya Susanto. Tesis ini memuat pembahasan tentang upaya komunikasi politik yang dilakukan pihak keraton Yogyakarta melalui atraksi budaya atau kesenian. Secara garis besar tesis ini menggambarkan kondisi-kondisi tertentu yang mendorong keraton untuk memilih kesenian sebagai alat diplomasi. Pada dasarnya hubungan Keraton dengan Belanda merupakan gambaran hubungan semi harmonis antara pihak penjajah dan kerajaan pribumi yang terikat kontrak politik. Intervensi Belanda bukan sesuatu yang diharapkan dari interaksi keduanya, namun di lain sisi upaya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi oleh Belanda harus juga melibatkan kekuasaan atas politik dan legitimasi-legitimasi yang melingkupinya. Berbeda dengan karya ilmiah di atas, skripsi ini memfokuskan pada upaya diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dalam menghadapi pihak

---

<sup>35</sup>Susanto, "Wayang wong dan tahta : Suatu Kajian tentang politik kesenian HB VIII 1921-1939" (Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1996).

Belanda. Diplomasi kebudayaan dipilih sebagai jalan untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi tertentu yang dimiliki pihak keraton. Fakta bahwa keberadaan Belanda yang membatasi ruang gerak Sultan sebelumnya, menjadikan Sultan Hamengku Buwono VIII mengupayakan cara baru untuk bernegosiasi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keraton.

Pustaka yang keempat adalah buku karya Fadly Rahman yang berjudul *Rijstaffel : Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*.<sup>36</sup> Fadly dalam bukunya membahas kebudayaan Rijstaffel yang berkembang pada masa kolonial Belanda. Budaya makan ini amat populer pada paruh kedua abad-19. Meskipun pengaruh kebudayaan Eropa terhadap kuliner Indonesia sangat terlihat, pengaruh dari budaya masyarakat pribumi terhadap kuliner Eropa juga dapat dilihat dalam kebudayaan *rijstaffel*.

Buku ini berisi pembahasan tentang kebudayaan makan mewah yang berkembang di Hindia Belanda, yang dikisahkan dengan mengalir sehingga mudah dipahami. Dalam buku ini dijelaskan tentang gambaran masa lampau dalam kehidupan rumah tangga yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan makan bangsa Eropa sehari-hari. Secara runtut dijabarkan latar belakang dari munculnya *rijsttafel* di Indonesia sebagai pengaruh dari perubahan gaya hidup, yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat tinggal yang juga berubah yang dialami oleh para prajurit Belanda yang harus menetap di Hindia Belanda karena mengabdikan pada negara. Dalam buku ini juga dimuat pembahasan mendetail tentang penyajian makanan *rijstaffel*.

Fokus kajian adalah salah satu faktor yang menginspirasi munculnya *rijstaffel*, suatu kebiasaan makan nasi masyarakat Hindia Belanda. Kebiasaan ini kemudian tanpa sadar diadaptasi oleh masyarakat Eropa sebagai kebiasaan yang ‘ganjil’ bagi warga Eropa asli. Dinyatakan pula bahwa kebiasaan kerajaan-kerajaan *vassal* Mataram pada masa itu berupa penyerahan upeti kepada raja juga membawa

---

<sup>36</sup>Fadly Rahman, *Rijstaffel : Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870—1942*.(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

seserahan berupa makanan daerah masing-masing untuk dihidangkan kepada raja.<sup>37</sup> Fenomena tersebut memunculkan rasa kagum sekaligus juga menjadi inspirasi munculnya kebudayaan makan *rijsttafel*. Kajian ini berguna untuk memberikan *insight* dari kaca mata bangsa Eropa sendiri terkait kegiatan makan di tanah jajahan.

Pustaka yang kelima adalah buku karya Djoko Soekiman yang berjudul *Kebudayaan Indis : Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa*.<sup>38</sup> Dalam bab II diungkapkan bahwa kehadiran Belanda sebagai penguasa baru di pulau Jawa menjadi faktor penyebab percampuran dua kebudayaan yang amat berbeda. Akibat dari pertemuan kebudayaan tersebut, kebudayaan Jawa mendapatkan sentuhan kebudayaan barat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh itu meluas dan mempengaruhi berbagai bidang dan unsur kebudayaan. Bahkan sedemikian luasnya pengaruh kebudayaan barat itu, hingga mencakup ketujuh unsur universal budaya utama yang dimiliki oleh suku Jawa.<sup>39</sup>

Dalam buku ini dijelaskan pula bahwa pada awalnya kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia memiliki tujuan ekonomi yaitu untuk berdagang. Seiring berjalannya waktu, itu berubah menjadi kepentingan yang berhubungan dengan usaha pengamanan kepentingan ekonomi dan perdagangannya. Kemudian bangsa Eropa ini merubah peranan mereka menjadi penguasa yang memiliki kedaulatan dimulai dari wilayah Pesisir Utara Jawa, berkembang menjadi seluruh Pulau Jawa bahkan hampir seluruh wilayah Nusantara. Dua kebudayaan yang saling bertemu ini, ditambah dengan sistem penjajahan dengan kekuasaan berdaulat, berdampak pada perubahan struktur masyarakat Jawa.

---

<sup>37</sup>Jaman dahulu tidak dikenal *supplier* (pemasok bahan makanan), namun sudah ada yang disebut *pisungsung* atau upeti. *Pisungsung* atau upeti tersebut dibawa dan diserahkan pada raja berdasarkan pada pengalaman, bahan tersebut memiliki kualitas yang baik dan disukai oleh raja. (Wawancara dengan Prof.Ir.Dr. Murdjiati Gardjito, tanggal 3 Juni 2016).

<sup>38</sup> Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis dan gaya hidup masyarakat pendukungnya di Jawa (Abad XVIII-Medio Abad XX)*. (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2000)

<sup>39</sup>Djoko Soekiman, 2000. *Kebudayaan Indis*, hlm.22

Percampuran kebudayaan antara adat ketimuran dan budaya barat inilah yang menjadi cikal bakal kebudayaan Indis. Perkembangan di bidang pendidikan sebagai akibat dari politik etis yang dipelopori oleh Kaum Liberal menciptakan sebuah golongan baru yaitu golongan pribumi yang terpelajar. Selain golongan tersebut, dikenal juga golongan bangsawan yang otomatis menempati sebuah posisi yang cukup berpengaruh dalam perkembangan kebudayaan gaya Indis. Golongan ini yang dianggap sebagai golongan yang menerima politik moderat dan bersikap kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Dari sini dapat dilihat keterkaitan antara isi buku dengan topik penelitian ini. Sebuah proses penerimaan dalam sebuah pengalaman perjalanan sejarah bangsa terjadi karena pembauran kebudayaan antara kebudayaan asli (kebudayaan keraton) dan kebudayaan pendatang (kebudayaan barat).

Berbeda dengan pustaka-pustaka tersebut di atas, skripsi ini berfokus pada upaya untuk merekonstruksi fenomena diplomasi Kebudayaan yang terjadi di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII. Proses Diplomasi Kebudayaan tercermin dalam perjamuan-perjamuan istana yang diselenggarakan Keraton. Perjamuan itu dipersiapkan untuk tamu-tamu asing yang diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara penting keraton, atau ketika keraton menerima kunjungan dari petinggi-petinggi Eropa yang berkunjung ke Yogyakarta. Penerimaan tamu-tamu asing melalui perjamuan istana merupakan bentuk diplomasi, karena mengandung tendensi politik atau upaya untuk mempengaruhi kebijakan maupun hubungan yang terjalin antara keduanya. Dalam proses diplomasi kebudayaan tersebut berbagai saluran diplomasi dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan atau aspirasi keraton.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Skripsi ini berjudul “Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda 1921-1939”. Sehubungan dengan judul skripsi yang telah dirumuskan tersebut dapat dijelaskan beberapa konsep yang relevan yaitu : kebudayaan, diplomasi kebudayaan, kesenian, dan keraton.

Kebudayaan adalah hasil dari rasa, karsa dan cipta. Kata kebudayaan sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kemudian dapat diartikan bahwa kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Namun, pendapat lain mengungkapkan bahwa kata budaya merupakan bentuk majemuk dari *budi-daya* yang berarti daya dan budi. Maka dari situ, kemudian muncul pengertian bahwa budaya adalah daya budi yang berupa rasa, karsa, dan cipta. Menurut antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.<sup>40</sup>

Kebudayaan merupakan tema yang tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas, tidak akan pernah menjadi basi untuk selalu ditinjau kembali. Kebudayaan dan manusia dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai masyarakat pendukung kebudayaan, bertumbuh bersamaan dengan perkembangan kebudayaan. Mereka saling berpengaruh dan terpengaruh dalam proses terwujudnya sebuah kebudayaan. Seperti pernyataan Koentjaraningrat tentang kebudayaan sebagai berikut : “Kebudayaan sebagai keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan yang harus didapatkan dengan cara belajar, dan yang kesemuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.”<sup>41</sup>

Keterikatan antara kebudayaan dan masyarakat pendukungnya akan tampak lebih nyata jika dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang cenderung mempunyai banyak kesamaan di dalam interaksi sosialnya. Dapat dikatakan bahwa jalinan yang terjadi itu bersifat *dwi-tunggal (loro-loroning atunggal)*. Hal itu disebabkan karena kebudayaan akan senantiasa diikuti oleh masyarakat pendukungnya secara turun-temurun, dari generasi ke generasi berikutnya, meskipun sering terjadi anggota masyarakat yang bersangkutan datang silih berganti karena beberapa faktor, seperti kematian atau pun kelahiran.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.144-146

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.144-145.

<sup>42</sup>Noor Sulistyو Budi,dkk., *Tradisi Makan dan Minum*, hlm.1.

Diplomasi kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, maupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan tendensi politik, ekonomi, ataupun militer.<sup>43</sup> Konsep diplomasi Kebudayaan tersebut berlaku untuk sebuah *nation* (negara), sedangkan lingkup penelitian ini adalah sebuah kerajaan pribumi yang ketika itu masih berjuang di bawah tekanan dan pengaruh Belanda, sehingga dapat dipermudah pemahaman konsep diplomasi kebudayaan di Keraton Yogyakarta sebagai upaya untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa asing melalui jalan seremonial-seremonial kebudayaan.<sup>44</sup>

Hal tersebut dimaksudkan sebagai solusi yang ‘lunak’ dan memiliki kemungkinan besar untuk diterima dengan baik dan tidak akan menimbulkan friksi antara kedua belah pihak. Upaya menjamu tamu-tamu asing dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk secara halus memperjuangkan kepentingan-kepentingan maupun aspirasi yang dimiliki oleh pihak keraton. Penjabaran tersebut dapat menggambarkan kondisi Keraton Yogyakarta terkait diplomasi kebudayaan yang dicanangkannya. Pada dasarnya, diberlakukannya diplomasi kebudayaan adalah sebuah cara untuk tetap menciptakan sebuah keseimbangan politik di Keraton Yogyakarta.

Kesenian menurut Koentjaraningrat adalah sebuah kompleks dari berbagai ide-ide, norma-norma, gagasan, nilai-nilai, serta peraturan di mana kompleks aktivitas dan tindakan tersebut berpola dari manusia itu sendiri dan pada umumnya berwujud berbagai benda-benda hasil ciptaan manusia.<sup>45</sup> Uraian tersebut merupakan definisi dari wujud sebuah kebudayaan menurut Koentjaraningrat. Dengan

---

<sup>43</sup>Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi bagi negara berkembang studi kasus Indonesia*. (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2007), hlm. 4.

<sup>44</sup>Film “Kersanan Ndalem” (Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Oranye Production, 2014), menit ke 24 : 00 – 24 : 42.

<sup>45</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.150.

demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenian merupakan wujud dari kebudayaan. Kesenian merupakan sarana manusia untuk mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide-idenya yang abstrak karena berada dalam alam pikiran manusia itu sendiri. Upaya untuk bisa memvisualisasikan gagasan maupun idenya yang masih abstrak dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung, dari aktivitas-aktivitas itu diharapkan sebuah hasil ciptaan atau hasil karya manusia sebagai penanda akan eksistensi gagasan maupun ide manusia yang bersifat abstrak karena berada dalam alam pikiran manusia.

Sama halnya dengan kesenian yang diciptakan di lingkungan keraton Yogyakarta—baik seni tari, seni wayang, seni drama, seni musik, hingga kuliner—merupakan perwujudan dari ide-ide maupun gagasan yang bersumber dari keyakinan masyarakat yang hidup dan berkembang di lingkungan keraton. Kepercayaan dan falsafah hidup orang Jawa tentu berpengaruh dalam proses penciptaan sebuah karya seni. Hal itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh para seniman yang menciptakan sebuah karya seni. Subjektivitas dalam sebuah kesenian adalah suatu hal yang sangat lumrah dan memang mudah ditemui. Contohnya adalah tari-tarian maupun pentas wayang wong di keraton Yogyakarta yang jalan ceritanya menceritakan tentang perjalanan hidup raja yang sedang bertahta sebagai upaya untuk mengukuhkan legitimasi raja yang bersangkutan di mata rakyat.

Penguatan legitimasi tersebut sarat dengan subjektivitas karena cenderung menampilkan sisi-sisi baik maupun keunggulan seorang raja. Raja digambarkan memiliki watak ksatria yang unggul dan jauh dari sifat-sifat tercela. Hal itu sangat masuk akal bila dihubungkan dengan keyakinan Orang Jawa tentang raja, yang meyakini raja sebagai wakil Tuhan di dunia (*khalifatullah*), sehingga menjadi sebuah keharusan bagi seorang Raja untuk memiliki sifat-sifat baik yang dapat dijadikan panutan oleh rakyatnya.

Bicara tentang legitimasi raja, Soemarsaid Moertono dalam bukunya *Negara dan usaha bina Negara di Jawa masa lampau : studi tentang masa mataram II, abad XVI-XIX* memaparkan tentang bagaimana hubungan antara raja (yang memerintah) dan masyarakat (yang diperintah). Peranan raja lebih kepada menjadi

pelindung bagi rakyatnya. Korelasi konteksnya dapat dilihat ketika pada masa pemerintahan HB VIII banyak peraturan di keraton yang disederhanakan, fleksibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan loyalitas rakyat terhadap raja yang baru.

Peranan rakyat sebagai kalangan yang diperintah oleh raja. Rakyat memiliki sebuah kepercayaan bahwa cara hidup yang aman adalah dengan menyesuaikan diri dengan alam, yang ketika itu mereka percayai dikuasai oleh dewa-dewa. Raja dipilih dengan kriteria *religio-magis* dengan adat turun-temurun dan sekaligus dianggap sama dengan kekuasaan para dewa, sehingga rakyat menurut pada raja yang berkuasa agar hidup mereka tentram. Kedudukan raja menempati tempat tertinggi, sehingga titah raja menjadi hukum yang berlaku di kerajaan tersebut. Hal tersebut dipengaruhi kepercayaan dan agama pada masa lampau yang diyakini oleh masyarakat Jawa, yang mendukung kekuasaan tunggal yang mutlak, dan meyakini bahwa tahta raja direstui oleh alam semesta. Hubungan antara raja dan rakyatnya merupakan hubungan *kawula-gusti* yang tidak hanya menunjuk hubungan tinggi dan rendah tapi juga menunjuk pada hubungan saling ketergantungan yang erat namun terpisah satu sama lainnya.

Lebih lanjut lagi, hubungan antara rakyat Jawa dan rajanya dapat dideskripsikan sebagai berikut, *Pertama*, hubungan pribadi satu sama lain yang saling menghormati. *Kedua*, merupakan suatu takdir kehidupan yang dianggap sebagai pola manusia dalam masyarakat apakah dia dilahirkan sebagai seorang raja atau hanya sebagai masyarakat biasa. Sehingga manusia sebenarnya pada masa itu hanya harus melakukan kewajibannya sesuai dengan takdir yang dia miliki. *Ketiga*, penguasa dalam membuat suatu kebijakan bagi masyarakat, harus memperhatikan para warganya. Dengan demikian, penguasa memiliki keunggulan untuk melindungi rakyat dan rakyat memiliki sikap patuh yang tulus. Ketiga poin tersebut dapat terlihat semasa pemerintahan HB VIII berlangsung, raja berupaya untuk dapat melindungi keraton dari intervensi politik pihak pemerintah kolonial melalui jalan-jalan yang penuh pertimbangan sekaligus simbolik. Begitupun dengan rakyat, yang ketika itu sebisa mungkin mengikuti larangan maupun himbuan yang disampaikan oleh raja mereka. Raja memberikan perlindungan, rakyat memberikan kesetiaan.

Di sisi lain, berbagai jenis kesenian yang berkembang di keraton dikembangkan dan dilestarikan sebagai bentuk upaya *nguri-uri budaya*, karena peranan keraton merupakan sentra kebudayaan Jawa. Beragam kesenian itu kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menciptakan kestabilan politik melalui cara yang lunak dan damai. *Pisowanan agung* atau perjamuan agung yang diselenggarakan dalam rangka peringatan agenda-agenda penting keraton merupakan sarana yang mewadahi penggunaan kesenian keraton dalam bentuk atraksi kebudayaan untuk menarik perhatian dan menyenangkan para tamu-tamu Belanda yang hadir.

Keraton merupakan adaptasi dari kata *ratu* (raja) yang menunjuk arti pada tempat kediaman *ratu* sehingga kalau dibaca secara jelas adalah *keratuan* atau tempat kediaman *ratu* (raja) dan selanjutnya berubah menjadi *Keraton*. Selain sebagai tempat kediaman raja, *Keraton* juga memiliki arti lain, seperti misalnya negara atau kerajaan. *Keraton* dapat juga berarti pekarangan raja yang meliputi wilayah di dalam tembok yang mengelilingi *Keraton*, ditambah dengan alun-alun, masjid, pasar dan penjara.<sup>46</sup>

*Keraton* dapat diartikan sebagai istana yang mengandung unsur keagamaan, filsafat dan kultural (kebudayaan). Dengan kata lain, keraton dapat diartikan sebagai lingkungan yang di dalamnya terdapat seluruh struktur dan bangunan wilayah keraton yang mengandung arti tertentu berkaitan dengan salah satu pandangan hidup Jawa yang sangat esensial. Pandangan hidup tersebut adalah "*Sangkan Paraning Dumadi*" (bahasa Jawa) yang berarti "dari mana asalnya manusia dan kemana akhirnya manusia setelah mati."<sup>47</sup> *Keraton* Yogyakarta pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia berfungsi antara lain sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, pusat pemerintahan, dan pusat kebudayaan dan pengembangannya.

---

<sup>46</sup>Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939. Edisi I*. (Yogyakarta : Taman Siswa, 1989), hlm.1.

<sup>47</sup>"Pengertian dan Fungsi Keraton", <http://www.historyfileon.blogspot.co.id/> diakses pada Jumat, 6 Januari 2017 pukul 19:23 WIB

## **F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis.<sup>48</sup> Metode Sejarah terdiri atas empat langkah yang beruntutan.

Tahap pertama adalah Heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang bersifat primer dan sekunder. Keduanya berguna untuk mendukung topik yang diambil oleh peneliti sejarah. Dalam skripsi yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939)”, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Indonesia, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Perpustakaan FIB UGM, Pusat Kajian Makanan Tradisional Universitas Gajah Mada, *Jogja Library Center*, Balai Arkeologi Yogyakarta, Museum Widya Budaya Keraton Yogyakarta, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Selain itu pengumpulan sumber juga dilakukan melalui penelitian lapangan Keraton Yogyakarta sebagai lingkup spasial yang dipilih untuk penelitian ini.

Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua macam yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer tertulis yang berupa arsip dalam skripsi ini berupa surat-surat Sultan kepada para abdi dalem maupun pangeran yang dipercaya terkait penyelenggaraan seremonial maupun upacara penyambutan tamu Belanda di keraton Yogyakarta. Selain itu pengumpulan sumber-sumber sekunder seperti laporan penelitian, artikel, jurnal maupun rubric dalam majalah juga diharapkan akan mempermudah penelusuran sekaligus membantu pendalaman penulis tentang topik yang akan direkonstruksi.

Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan *abdi dalem* maupun kerabat keraton yang mengetahui cerita tentang hubungan keraton dengan Belanda. Dari wawancara itu, diperoleh gambaran tentang perjamuan yang diselenggarakan Keraton sebagai penghormatan terhadap tamu-tamu Belanda yang datang memenuhi undangan perjamuan. Pengumpulan dan penelusuran sumber-sumber sejarah dengan

---

<sup>48</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm.32.

cara mewawancarai *abdi dalem* atau kerabat keraton yang memiliki pengetahuan akan peristiwa sejarah yang diteliti sangat membantu peneliti memperoleh gambaran tentang saluran-saluran yang dipergunakan dalam melancarkan sebuah diplomasi kebudayaan.

Upaya-upaya seremonial kebudayaan yang semakin intens pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII menunjukkan adanya upaya untuk menonjolkan seremonial-seremonial kebudayaan keraton sebagai daya tarik sekaligus ungkapan penghormatan kepada tamu-tamu Belanda yang hadir ke keraton. Dalam seremonial-seremonial seperti itu juga disajikan sebuah perjamuan makan dan minum ala barat yang dipersiapkan sedemikian rupa sebagai bentuk sikap penyambutan kepada tamu-tamu Belanda. Makanan dan minuman yang dipersiapkan untuk perjamuan juga diupayakan untuk menyesuaikan selera dari tamu-tamu tersebut. Ini membuktikan bahwa Keraton Yogyakarta berusaha untuk membuat tamu-tamu dari Belanda terkesan, sekaligus mewujudkan keinginan untuk menciptakan kestabilan dalam hubungan keduanya.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah arsip keraton Yogyakarta yang berupa surat-surat sultan HB VIII terkait perintah untuk mempersiapkan penyambutan untuk tamu-tamu keraton dari Belanda. Selain itu, juga digunakan foto-foto dokumentasi sezaman yang menggambarkan tentang interaksi pihak keraton Yogyakarta dengan pihak pemerintah kolonial Belanda yang diunduh dari situs KITLV <http://media-kitlv.nl/>, film dokumenter dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul “Kersanan Ndalem”, yang menceritakan tentang kuliner kesukaan Sultan. Dalam film dokumenter tersebut juga diinformasikan tentang perjamuan makan dan minum tamu Belanda oleh keraton Yogyakarta sebagai sebuah bentuk diplomasi kebudayaan yang bertujuan untuk melancarkan kepentingan atau aspirasi dari pihak keraton.

Selain itu, peneliti juga mencoba minuman serupa bir yang tidak memabukkan yang dikenal dengan bir Jawa. Minuman ini dihidangkan pada *Pisowanan Agung* di Keraton Yogyakarta saat mengundang tamu-tamu pembesar Belanda. Latar belakang dari lahirnya minuman ini, tidak lain karena adanya penyesuaian budaya minum antara tamu-tamu Belanda yang hadir memenuhi

undangan keraton dengan para bangsawan keraton yang juga hadir dalam agenda tersebut. Bir Jawa sudah dikenal sejak masa Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921).<sup>49</sup> Minuman tersebut diciptakan sebagai upaya untuk mengimbangi kebiasaan minum orang Belanda yang berkunjung memenuhi undangan *pisowanan agung*. Selanjutnya, peneliti juga mengunjungi ruang penyimpanan perlengkapan jamuan keraton<sup>50</sup> yang menambah referensi sekaligus membuktikan adanya upaya keraton untuk sedapat mungkin memfasilitasi tamu-tamu Belanda yang hadir pada jamuan istana dengan beragam sajian yang disesuaikan dengan selera tamu-tamu. Selain mengunjungi dan melihat koleksi perlengkapan untuk jamuan keraton pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII, peneliti juga melihat *Gedhong/ Bangsal Sarangbaya* yang terletak di sisi kanan *Gedhong Patehan* yang dulu dipergunakan sebagai tempat penyimpanan minuman keras untuk kepentingan jamuan tamu-tamu Sultan.<sup>51</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan kritik sumber yang merupakan langkah kedua dalam metode sejarah. Pada tahapan ini dilakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas sumber tersebut. Setelah pengumpulan sumber, dilakukan pengujian sumber melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berhubungan dengan bentuk fisik dari sumber yang ditemukan, sedangkan kritik intern berhubungan dengan isi sumber sejarah. Untuk menguji kredibilitas, dilakukan perbandingan informasi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh sebuah fakta sejarah yang kredibel. Pengujian otentisitas sumber sejarah dilakukan dengan cara menyeleksi masa dihasilkan atau dikeluarkannya sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan.

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Prof.Ir.Dr. Murdjati Gardjito, tanggal 3 Juni 2016.

<sup>50</sup>Terletak di *Gedhong Patehan*, karena lokasinya berdekatan dengan *Patehan*, tempat khusus untuk mempersiapkan *unjukkan* bagi raja dan abdi dalem.

<sup>51</sup>Keberadaan *Bangsas Sarangbaya* menurut *abdi dalem* keraton disebut seperti itu karena mengandung makna bahwa tempat atau bangsal itu merupakan sumbernya marabahaya. Pemberian nama tersebut agar orang tidak mendekat dan mengikuti budaya minum-minuman keras yang ada di *Bangsas Sarangbaya*. “Dahulu Tempat ini menjadi Tempat orang Belanda minum-minum”, (<http://keyogyakarta.com/wisata-yogyakarta/dahulu-tempat-ini-menjadi-tempat-orang-belanda-minum-minum/> diakses pada 27 april 2016 pkl 22:51).

Sumber – sumber pendukung juga dipertimbangkan kredibilitasnya melihat dari jarak maupun siapa subjek penyampainya karena semakin jauh dari penyampai pertama, kredibilitasnya akan semakin diragukan karena fakta-fakta dapat terkikis oleh subjektivitas penyampai kisah. Beberapa narasumber yang mendukung pengumpulan sumber lisan dalam skripsi ini adalah sosok yang kesehariannya sangat dekat dengan objek penelitian skripsi ini, tumbuh dalam lingkup spasial penelitian, menjalani rutinitas harian maupun sebagai pengamat budaya. Keterangan yang didapatkan dari narasumber tersebut kemudian dicocokkan dan nantinya diharapkan dapat mendukung untuk dikoroborasikan dengan sumber-sumber yang dikumpulkan sebelumnya, sehingga bisa mendukung opsi untuk mempergunakan sumber tersebut sebagai referensi dalam skripsi ini.

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu kegiatan menetapkan hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis dan sebab-akibat dengan melakukan imajinasi, dan analisis. Tahap ini perlu dilakukan karena fakta-fakta sejarah yang ditemukan masih tidak saling berhubungan, dan belum menunjukkan makna. Barulah sampai pada tahapan terakhir yaitu rekonstruksi sejarah atau historiografi dengan penulisan secara kronologis dan sistematis sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh pembacanya. Dalam hal ini, digunakan konsep kebudayaan, diplomasi kebudayaan, kesenian (termasuk seni tari, seni pertunjukan, seni musik, tata busana, dan kuliner). Fakta-fakta sejarah harus dirangkai dengan baik, dikorelasikan, dikoroborasikan sehingga akan menjadi suatu kesatuan yang kronologis dan harmonis untuk dapat dibaca kembali sebagai sebuah rekonstruksi peristiwa sejarah.

Historiografi atau rekonstruksi sejarah adalah tahap penyampaian sintesis yang diperoleh dari tahapan-tahapan terdahulu dalam bentuk karya tulis sejarah. Penulisan ini dipaparkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca. Pada tahapan ini dibutuhkan kemampuan untuk menulis sebuah tulisan sejarah berdasar sumber-sumber sejarah yang otentik dan kredibel yang telah diuji secara kritis baik ekstern maupun intern, dan sudah dianalisis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu skema isi pembahasan yang disusun secara sistematis Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut.

BAB I berisi pembahasan yang meliputi : Latar belakang dan permasalahan, Ruang Lingkup, Tinjauan Pustaka, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II memuat pembahasan tentang sejarah kelahiran keraton Yogyakarta yang berisi gambaran tentang latar belakang hubungan yang terjalin antara pihak keraton dan pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, subbab tersebut memuat pembahasan tentang pola hubungan antara keduanya dibagi menjadi dua masa yaitu masa VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, subbab tentang profil Sultan Hamengku Buwono VIII juga disajikan sebagai gambaran tentang sosok yang menjadi fokus dari penelitian ini. Pembahasan tentang sosok Sultan Hamengku Buwono VIII mencakup latar belakang kehidupan yang mempengaruhi sikap dan kebijakannya dalam menjalin hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam bab ini juga digambarkan tentang perjalanan Sultan Hamengku Buwono VIII menuju tahta, kebijakan-kebijakannya pasca menjadi raja Yogyakarta. Pembahasan terkait dengan bentuk-bentuk hubungan ekonomi, politik dan budaya juga disajikan untuk memberikan gambaran yang lebih luas, dilengkapi dengan keterangan tentang hubungan-hubungan tersebut dari masa pemerintahan sultan-sultan yang pernah memerintah keraton Yogyakarta sejak awal berdirinya hingga masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII.

BAB III memuat pembahasan tentang diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh keraton Yogyakarta, yang bertujuan untuk melancarkan tuntutan-tuntutan keraton terhadap pihak pemerintah kolonial Belanda. Diplomasi kebudayaan dilakukan dalam berbagai pertunjukan kesenian ketika ada *pisowanan Agung* atau perjamuan tamu-tamu pembesar Belanda yang diselenggarakan keraton. Pertunjukan kesenian dan jamuan makan-minum ini diharapkan dapat menyampaikan ungkapan penghormatan dan persahabatan dari keraton terhadap pihak Belanda yang hadir. Sikap bersahabat yang ditunjukkan keraton merupakan bentuk upaya yang sesuai dengan jiwa zaman karena dapat meminimalisir friksi dalam interaksi antara

keduanya. Diplomasi melalui kebudayaan ini dianggap dapat mewujudkan kondisi yang menguntungkan bagi pihak keraton tanpa menimbulkan friksi dengan pihak Belanda. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan tentang acara-acara keraton yang melibatkan pihak Belanda dan acara-acara penting yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda di Yogyakarta dengan mengundang pihak keraton untuk hadir. Pembahasan mencakup saluran-saluran yang dipergunakan dalam proses diplomasi kebudayaan yang berupa berbagai kesenian yang berkembang di lingkungan keraton Yogyakarta seperti seni tari, seni drama (*wayang wong*), seni musik, hingga kuliner dalam *Pisowanan Agung*. Selain itu, hasil-hasil diplomasi kebudayaan juga dibahas dalam bab ini.

BAB IV memuat pembahasan tentang hambatan dalam proses diplomasi kebudayaan antara keraton dan pemerintah kolonial Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, beserta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam pelaksanaannya diplomasi kebudayaan tentu mengalami kendala-kendala, sebab penggunaan kebudayaan sebagai alat diplomasi tidak menjamin tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda dipenuhi, namun setidaknya upaya untuk mencapai kondisi hubungan yang stabil tanpa friksi antara keduanya adalah hal terakhir yang dapat diharapkan.

BAB V memuat simpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.